



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDIRMAN DJAYALEKSANA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**
3. NHK : **270612**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 308.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp. 130.000.000
2. MOBIL, NISSAN XTRAIL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, VESPA PIAGIO SPRINT 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI KLX 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 342.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 245.881.516**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.065.881.516**III. HUTANG** Rp. 746.719.606**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.319.161.910



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.